

## ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN GURU HONORER PEMERINTAH KABUPATEN ENDE (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende)

Chyntya Apriani<sup>1</sup>, Sabra B. Wahab Thalib<sup>2</sup>, Apriana Marselina<sup>3</sup>,

Program Studi Akuntansi

<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores

Email: [Chyntyaapriani@gmail.com](mailto:Chyntyaapriani@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study uses a qualitative approach method, to describe the accounting information system of the honorary teachers payroll. And also the source of the used data is primary data. The data will be analyzed by descriptive analysis method. Based on the data analysis, it is concluded that the Government in regulating its operational activities has implemented an accounting information system and internal control over the payroll system using SIMDA and SIPD applications. All document data, namely SPP, SPPM, are inputted to the Regional Financial and Asset Management Office of Ende Regency. However, in its implementation there are still run into delays in paying salaries. The cause of the late disbursement of the regional revenue and expenditure budget for the 2021 fiscal year is due to a change in the system. Initially the APBD disbursement system used the Regional Management Information System (SIMDA) to the Regional Government Information System (SIPD), then there was a transition to the use of new applications in the budget disbursement process in which the budget post for honorary staff was returned to their respective fields where the honorary staff/honorary teachers work, In addition, the payment process uses Inventory Money (UP) or Change Money(GU) depending on the availability of funds at the time of disbursement of Inventory Money.*

**Keywords:** Accounting Information System

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian guru honorer Pemerintah Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penggajian guru honorer. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Data akan dianalisa dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah dalam mengatur kegiatan operasionalnya telah menrapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern terhadap sistem penggajian dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD. Semua data dokumen yaitu SPP, SPPM diinput pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Penyebab telatnya pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 karena adanya perubahan sistem. Awalnya sistem pencairan APBD menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka ada transisi penggunaan aplikasi baru dalam proses pencairan anggaran yang mana pos anggaran untuk tenaga honorer dikembalikan ke bidangnya masing-masing dimana tenaga honorer/guru honorer itu bekerja, selain itu proses pembayarannya menggunakan uang persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) tergantung ketersediaan dana pada saat pencairan Uang Persediaan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem akuntansi berperan sangat penting dalam membantu manager pengendalian perusahaan agar terhindar dari segala kemungkinan yang akan merugikan perusahaan. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang terpercaya dan tepat waktu untuk membantu manajemen

dalam mengambil keputusan dan mengendalikan perusahaan sehingga sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan intern maupun ekstern perusahaan.

Penerapan teknologi digunakan untuk menyederhanakan tugas-tugas pokok operasional dan kontrol yang terdapat pada sistem pemrosesan transaksi. Dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan, semua tidak terlepas dari dukungan sistem informasi yang memberikan kemudahan dalam melakukan penyimpanan data dan pencarian data-data (Miten & Devitra, 2018). Untuk itu, perlu adanya sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mulyadi (2006) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengendalikan operasional perusahaan. Unsur sistem akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan

Menurut Diana & Setiawati (2011) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sedangkan menurut Krismiaji (2015) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan Informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan. Sistem penggajian dalam organisasi pemerintah sangat dibutuhkan karena dengan adanya sistem penggajian yang dapat mengorganisir proses penerimaan atau pembagian gaji pada setiap orang yang bekerja, sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam proses penggajian tersebut (Purba, 2018). Pemerintah berkewajiban membalas jasa dari kerja yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia atau guru dalam bentuk gaji. Gaji merupakan salah satu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerja karyawan tersebut (Wijoyo, 2020).

Peraturan Bupati Ende No. 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah Kabupaten Ende. Dinas P dan K mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan khusus untuk gaji guru honorer diurus oleh sub bagian keuangan sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu salah satu tugasnya antara lain menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran

Pemerintah dalam mengatur kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern terhadap sistem penggajian. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana dalam perjalanan waktu telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji bagi guru honorer. Berdasarkan informasi yang di muat pada koran pos kupang Bapak Plt Kepala Dinas P & K Kabupaten Ende mengatakan keterlambatan gaji disebabkan administrasi guru honorer tidak lengkap dan terlambat masukan daftar hadirnya. lama keterlambatan gaji pada tahun 2018 berjalan hanya 4 bulan saja. Selain itu untuk tahun 2021 keterlambatan pembayaran gaji guru honorer disebabkan oleh adanya sistem baru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mana tenaga honorer dikembalikan ke bidangnya masing-masing dan SK pengangkatannya bukan lagi oleh Bupati tetapi oleh Kepala OPD nya masing-masing, sehingga proses pengajuannya harus serempak dan proses pembayarannya menggunakan uang persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) tergantung ketersediaan dana pada saat pencairan Uang Persediaan (UP). Sementara besaran pencairan Uang Persediaan Cuma 25% dari pagu anggaran pada Dinas P dan K Kabupaten Ende.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian guru honorer Pemerintahan Kabupaten Ende.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende, penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi organisasi mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian yang mampu mendukung pengendalian organisasi.

2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan.
3. Bagi Akademisi, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

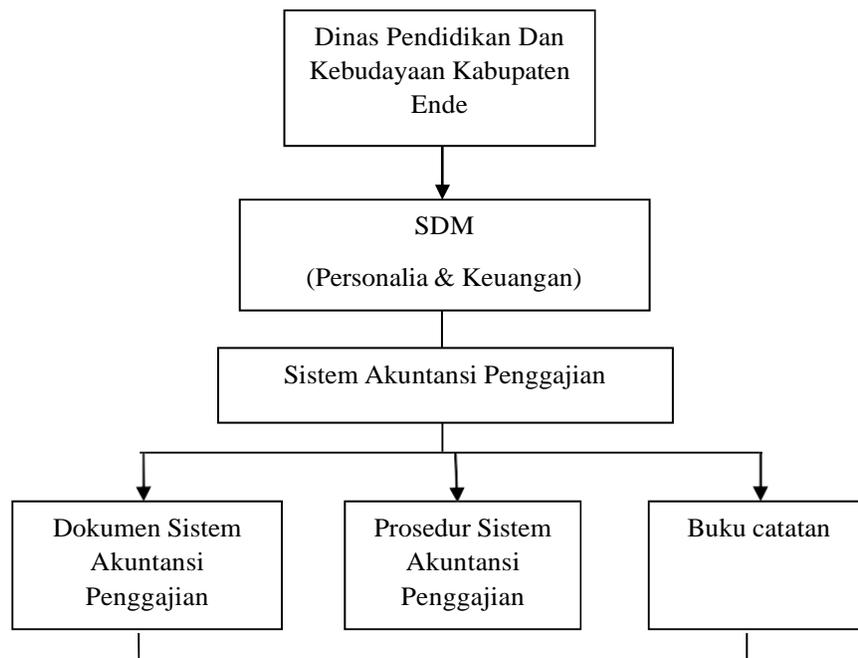
### Penelitian Terdahulu

Franciska Veira Christyana (2015) “Sistem Penggajian Karyawan pada PT.Persada (Kopindosat) Yogyakarta.” sistem administrasi penggajian memerlukan perhatian khusus karena gaji merupakan komponen yang penting dalam manajemen suatu perusahaan, khususnya bagi karyawan. Tanpa gaji, kemungkinan aktivitas operasi perusahaan akan terhenti karena tidak adanya timbal balik atas jasa yang mereka lakukan di perusahaan tersebut. Untuk dapat memberikan gaji kepada karyawannya, PT. Persada memerlukan suatu sistem administrasi penggajian yang dapat memperlancar arus pemberian gaji kepada karyawan.

Janan Az-Zhara (2018) “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Industri Kereta Api (Persero)”. Menurut hasil wawancara dengan karyawan divisi human capital ang bertugas menangani penggajian dan pengupahan, terdapat pegawai tetap dan pegawai kontrak dengan jumlah pegawai tetap 868 dan pegawai kontrak 789 pada tahun 2018 dibulan maret. Diantara banyaknya karyawan tersebut ternyata pernah terjadi lebih atau kurang gaji yang diterima oleh karyawan, hal tersebut disebabkan karena kesalahan dalam pencatatan waktu kerja. Hal itu berdampak pada penerimaan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan semestinya.

Fida Nurul Fathin (2018) ”Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon”. KPPN membutuhkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi agar tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, ekonomis dan efisien. Maka dari itu, Kementerian Keuangan membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan negara terintegrasi disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN.

### Rerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2020

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif. Lokasi Penelitian Bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prosedur Pengumpulan Berkas Dan Dokumen Lainnya Oleh Guru Honorer**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menginformasikan kepada seluruh guru honorer agar menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan gaji. Adapun dokumen yang di minta adalah

1. Fotokopi SK honorer
2. Asli surat pernyataan melaksanakan tugas
3. Fotokopi daftar hadir

Dengan batas penyampaian dokumen tersebut paling lambat setiap tanggal sepuluh dalam bulan. Sebanyak 118 orang guru honorer harus menyiapkan berkas atau dokumen-dokumen tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap sehingga jumlah berkas yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sejumlah 354 berkas. Untuk penggajiannya dilakukan secara kolektif, dengan demikian jika salah satu guru honorer tidak menyerahkan seluruh dokumen yang diminta maka akan mempengaruhi proses pencairan gaji guru honorer. Mengingat dengan kondisi geografis Kabupaten Ende dalam hal ini tempat kerja atau tempat tugas para guru honorer ini bervariasi, ada yang mengajar di daerah pedalaman atau terpencil dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan dokumen tersebut ke Dinas. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan proses pencairan gaji guru honorer.

#### **Sistem Penggajian Guru Honorer Kabupaten Ende**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ende dalam melakukan pembayaran gaji guru honorer Kabupaten Ende berpedoman pada aturan tersebut. Adapun jumlah guru honorer lingkup pemerintah Kabupaten Ende sebanyak 118 orang dengan besaran gaji pokok bagi guru honorer setiap bulannya sesuai dengan jenjang pendidikan SLTA Rp. 1.350.000, DIII Rp 1.500.000, S1 Rp. 1.750.000. perbulan.

Tugas Bendahara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik dan
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam mengatur kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern terhadap sistem penggajian dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD. Semua data dokumen yaitu SPP, SPPM diinput pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana dalam perjalanan waktu telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji bagi guru honorer.

Penyebab telatnya pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021 karena ada perubahan sistem. Awalnya sistem pencairan APBD menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA ) dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), tapi mulai tahun 2021 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan Perubahan sistem inilah maka ada transisi penggunaan aplikasi baru dalam proses pencairan anggaran SIPD sehingga butuh waktu dan aturan pendukung. sehingga proses pengajuannya harus serempak dan proses pembayarannya menggunakan uang persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) tergantung ketersediaan dana pada saat pencairan Uang Persediaan. Sementara besaran pencairan Uang Persediaan Cuma 25% dari pagu anggaran pada Dinas P dan K Kabupaten Ende.

### **Prosedur Yang Digunakan dalam Proses Pencairan Gaji Guru Honorer**

Prosedur yang digunakan dalam proses pencairan gaji guru honorer pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende sebagai berikut tenaga honorer menyerahkan SK honorer, SPMT, dan absensi ke bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk diserahkan ke bendahara pada sub bagian keuangan Sekertariat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk di verifikasi. Setelah dokumennya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende sebagai pengguna anggaran. Setelah dokumen tersebut ditandatangani selanjutnya bendahara menyerahkan dokumen-dokumen yaitu daftar hadir, sk tenaga honorer, SPMT serta menginput dokumen SPP, SPM dan SPTJ tersebut pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini bidang akuntansi melakukan verifikasi dokumen-dokumen dimaksud setelah dinyatakan memenuhi syarat atau valid maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan kepada Bendahara untuk melakukan proses pencairan di Bank NTT. Setelah menerima SP2D Bendahara membuat Daftar Rincian Gaji (DRG) dan Cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diserahkan pada Bank NTT untuk melakukan transfer ke rekening tenaga honorer.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian guru honor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende yaitu

1. Daftar Absensi atau Daftar Hadir

Daftar hadir guru honorer dibuat setiap bulan menggunakan buku absensi, daftar harian kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende kemudian bagian kepegawaian dinas memverifikasi daftar hadir tersebut dan diserahkan ke bendahara atau pengelola gaji.

2. Daftar Rincian Gaji

Semua guru honor atau pegawai honor wajib menyetorkan daftar hadir jika daftar hadir sudah terkumpul bendahara akan membuat daftar rekapan yakni untuk penggajian gaji guru honorer. Dengan rincian untuk total gaji kontrak yakni untuk gaji kotor potongan PPh 21 dan gaji bersihnya. Dasar rekapan bendahara input dalam simda di BPKAD Kabupaten Ende bidang akuntansi.

3. Surat Kelengkapan Pencairan Gaji

- a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b) Surat Perintah Membayar (SPM)
- c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)

Semua berkas yang sudah diinput yakni SPP, SPM, dan SPTJ setelah ditandatangani oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran diantar ke bagian verifikasi bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende untuk diproses SP2D. Setelah SP2D diterbitkan bendahara melakukan pencairan di Bank NTT cabang Ende dan selanjutnya Bank akan melakukan proses kliring ke masing-masing rekening guru-guru tersebut.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem Informasi Akuntansi Penggajian Guru Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pemerintah dalam mengatur kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern terhadap sistem penggajian dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD. Semua data dokumen yaitu SPP, SPPM diinput pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana dalam perjalanan waktu telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji bagi guru honorer.
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengharuskan setiap tenaga honorer gajinya dianggarkan pada Rencana Kegiatan Anggaran masing-masing bidang termasuk guru honorer juga dianggarkan oleh bidang sesuai tingkatan sekolah misalnya gaji guru SD dianggarkan pada Bidang GTK Dinas P dan K Kabupaten Ende dan gaji guru honorer SMP di anggarakan oleh bidang SMP dinas P dan K Kabupaten Ende.
3. Penyebab terlambatnya pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021 karena ada perubahan sistem. Awalnya sistem pencairan APBD menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA ) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tapi mulai tahun 2021 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian DalamNegeri. Dengan Perubahan sistem inilah maka ada transisi penggunaan aplikasi baru dalam proses pencairan anggaran SOPD sehingga butuh waktu dan aturan pendukung.
4. Tahun 2021 keterlambatan pembayaran gaji guru honorer disebabkan oleh adanya sistem baru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mana anggaran untuk tenaga honorer dikembalikan ke bidangnya masing-masing dan SK pengangkatannya bukan lagi oleh Bupati tetapi oleh masing-masing Kepala OPD, sehingga proses pengajuannya harus serempak dan proses pembayarannya menggunakan uang persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) tergantung ketersediaan dana pada saat pencairan Uang Persediaan. Sementara besaran pencairan Uang Persediaan Cuma 25% dari pagu anggaran pada Dinas P dan K Kabupaten Ende.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende agar mensosialisasikan penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) bagi tenaga guru honorer, sehingga setiap guru honorer memahami terjadinya perubahan sistem, selanjutnya guru honorer harus lebih disiplin waktu dalam mengumpulkan dokumen administrasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, D., & Setiawati, L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. CV. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Az-Zhara, J. (2018). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Industri Kereta Api (Persero)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Christyana, F. V. (2015). *Sistem penggajian karyawan pada PT. Persada (Kopindosat)* Yogyakarta.
- Fathin, F. N. (2018). *Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon*.
- Krismiaji. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. In Yogyakarta: UPP STIM YKPN (Edisi Keem).
- Miten, F. K., & Devitra, J. (2018). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Radio Republik Indonesia (Rri) Jambi*. Jurnal Manajemen Sistem Informasi, 3(2), 1083–1092.

- Mulyadi. (2006). *Sistem informasi akuntansi*. In Yogyakarta: BPFPE.
- Purba, D. H. P. (2018). *Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan: Studi kasus pada sebuah rumah sakit*. Jurnal Manajemen, 4(1), 15–22.
- Wijoyo, H. (2020). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian dan Absensi Karyawan Megara Hotel Pekanbaru Berbasis Web*. Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen, 2(2), 56–76.